



FORESTS & FINANCE

BRIEFING

PHOTO: ULET IFANSASTI / WILDLIFE ASIA / RAN / RACING EXTINCTION

SIME DARBY DIDESAK UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK HAK ATAS LAHAN YANG TELAH BERLANGSUNG TERLALU LAMA SEBELUM MENCATATKAN DIVISI PERKEBUNANNYA KE BURSA EFEK

Januari 2017

Sime Darby dilaporkan sedang melakukan persiapan untuk mencatatkan (*listing*) sejumlah divisinya ke dalam bursa efek Asia awal 2017 ini. Salah satu divisi yang diperkirakan akan masuk adalah divisi perkebunan Sime Darby yang menghasilkan lebih dari seperempat pendapatan perusahaan tersebut dan lebih dari sepertiga labanya.¹ Salah satu anak perusahaan perkebunan kelapa sawit Sime Darby di Indonesia masih memiliki sengketa sengit berkepanjangan dengan beberapa masyarakat adat yang mengajukan sejumlah keluhan terhadap perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya pencaplokan tanah adat dan dilakukannya konversi menjadi perkebunan kelapa sawit Sime Darby tanpa adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC). Sebelum pencatatan tersebut terlaksana, masyarakat terdampak dan masyarakat sipil mendesak bank dan investor Sime Darby untuk mewajibkan perusahaan tersebut menyelesaikan konflik yang masih berlangsung dengan masyarakat dan memastikan bahwa hak masyarakat atas lahan dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Sime Darby merupakan salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di dunia dan memproduksi sekitar 16% dari seluruh minyak sawit bersertifikat RSPO.² Perusahaan ini bangga akan praktiknya yang lestari secara sosial, keanggotaannya dalam RSPO sejak 2004, dan posisinya sebagai penanda tangan the United Nations Global Compact dan Deklarasi New York tentang Hutan.³ Pada bulan September 2016 perusahaan ini meluncurkan Responsible Agriculture Charter⁴ dan mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan Palm Oil Innovation Group (POIG).⁵ Pada bulan Desember 2016 Sime Darby menandatangani High Carbon Stock Convergence Agreement yang mengatur elemen dasar dari seperangkat peraturan tunggal untuk menerapkan komitmennya mengenai “tanpa deforestasi” dan proses FPIC yang kuat untuk mengakui hak dan kepentingan masyarakat setempat.⁶

Walaupun terdapat indikasi adanya komitmen terhadap praktik usaha lestari, perusahaan ini belum menyelesaikan pelanggaran serius terhadap hak tanah adat yang melibatkan anak perusahaannya, PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. PT MAS mengoperasikan 1.462 ha tanah masyarakat adat tanpa FPIC sejak tahun 1995. Pada tahun 2012 pihak masyarakat terdampak mengajukan keluhan kepada RSPO di mana lima tahun kemudian keluhan tersebut belum juga terselesaikan. Upaya baru-baru ini yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat sipil pada tahun 2015 dan 2016 adalah menetapkan rencana aksi pemetaan partisipatif dan pengembalian tanah adat. Akan tetapi upaya tersebut belum ditangani dengan sebagai mana mestinya.⁷

Keluhan masyarakat terhadap PT MAS anak perusahaan Sime Darby yang masih belum terselesaikan antara lain sebagai berikut.

- Beroperasi di tanah adat di Kalimantan Barat sejak tahun 1995 tanpa adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat
- Kurangnya transparansi status lahan dan perjanjian kemitraan
- Ketidakmampuan untuk melaksanakan janji mengenai pembangunan infrastruktur
- Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan mengenai perkebunan plasma⁸
- Ketidakpatuhan terhadap Prinsip & Kriteria 2.2 RSPO yang mewajibkan “hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh masyarakat setempat yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat atau hak pemanfaatan”
- Lembar fakta mengenai konflik tersebut diterbitkan oleh TuK-Indonesia dan dapat dilihat di [sini](#)¹ dan pernyataan Sime Darby terhadap lembar fakta TuK-Indonesia dapat dilihat di [sini](#)¹. Informasi mengenai ringkasan pengaduan RSPO dapat ditemukan di [sini](#)¹ dan status negosiasi penyelesaian sengketa dapat ditemukan di [sini](#)¹.

Pemodal dan investor besar yang mendanai Sime Darby⁹ (dapat dilihat dalam daftar berikut ini) kemungkinan besar akan didekati terkait penjaminan (*underwriting*) dan/atau kepemilikan saham dalam *listing* divisi perkebunan perusahaan tersebut. Beberapa lembaga tersebut (termasuk HSBC, Standard Chartered, Citigroup, Norwegian Government Pension Fund dan Pensioenfonds Zorg & Welzijn) memiliki kebijakan yang *melarang penyediaan layanan finansial bagi perusahaan klien yang melanggar standar lingkungan dan sosial kunci*, seperti misalnya pelanggaran terhadap hak atas tanah.

REKOMENDASI

Sime Darby harus segera menyelesaikan keluhan yang masih belum selesai dari masyarakat yang terkena dampak PT MAS hingga keluhan masyarakat terdampak tersebut terpenuhi.

Bank dan Investor harus mewajibkan Sime Darby untuk menyelesaikan keluhan yang masih belum selesai dari masyarakat yang terkena dampak PT MAS sebagai prasyarat keterlibatannya dalam pendaftaran atau perjanjian pendanaan di masa mendatang dengan perusahaan tersebut.

Tabel 1: Utang dan penjaminan berdasarkan jenis pendanaan (Juta USD, September 2009-2016)

Pemodal	Negara	Penerbitan obligasi	Kredit korporasi	Fasilitas kredit bergulir	Penerbitan saham	Nilai total (Juta USD)
Malayan Banking	Malaysia	1.491	100		590	2.181
CIMB Group	Malaysia	376				376
Public Bank	Malaysia	326				326
OCBC	Singapura		220	80		300
Mizuho Financial	Jepang		170	110		280
HSBC	Kerajaan Inggris	75	90	60		225
Mitsubishi UFJ Financial	Jepang		120	80		200
Standard Chartered	Kerajaan Inggris	75	90	10		175
ANZ	Australia		130	10		140
Citigroup	Amerika Serikat	75				75
Hong Leong Company	Malaysia	50				50
Total		2.469	920	350	590	4.329

Tabel 2: Obligasi dan kepemilikan saham (Juta USD, September 2016 pengarsipan yang paling baru)

Induk Investor	Negara Induk Investor	Nilai Total (dalam Juta USD)
Employees Provident Fund	Malaysia	1.305
KWAP Retirement Fund	Malaysia	366
Malaysian Hajj Pilgrims Fund	Malaysia	285
Public Mutual	Malaysia	242
Vanguard	Amerika Serikat	98
BlackRock	Amerika Serikat	95
GIC	Singapura	92
Prudential (UK)	Kerajaan Inggris	77
Oversea-Chinese Banking Corporation	Singapura	73
Norwegian Government Pension Fund - Global	Norwegia	48
Dimensional Fund Advisors	Amerika Serikat	26
Pensioenfond's Zorg & Welzijn	Belanda	21
CIMB Group	Malaysia	20
JPMorgan Chase	Amerika Serikat	20
Deutsche Bank	Jerman	15
Total		2.784

¹ Sime Darby (2016, Oktober), *Innovating the Future: Annual Report 2016*, p. 7; Lee, L. (2016, November 25), "Malaysia's Sime Darby could list its plantations division", online: <http://www.reuters.com/article/sime-darby-results-idUSL4N1DQ2SB>, dilihat bulan November 2016. Beberapa analis juga mengindikasikan adanya kemungkinan skenario pemisahan kembali (*demerger*) divisi perkebunannya.

² RSPO, 30 September 2016. "Certified Growers". Online: <http://www.rspo.org/certification/certified-growers>

³ Laman Situs Sime Darby, (n.d), "Performance Highlights", online: www.simedarby.com/sustainability/performance-highlights/performance-highlights

⁴ Sime Darby, (21/09/2016), Pres Rilis: "Sime Darby Plantation launches responsible agriculture charter", online: <http://www.simedarby.com/media/press-release/sime-darby-plantation-launches-responsible-agriculture-charter>

⁵ Sime Darby, (21/09/2016), Pres Rilis: "Sime Darby Plantation launches responsible agriculture charter", online: <http://www.simedarby.com/media/press-release/sime-darby-plantation-launches-responsible-agriculture-charter>

⁶ See: <http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2016/11/Final-HCS-Convergence-Agreement-.pdf>

⁷ See: http://www.rspo.org/acop/2015/sime-darby-plantation-sdn-bhd/progress-report_pt-mas.pdf

⁸ Investigation Report on Conflict of PT Mitra Austral Sejahtera's Plantation Land in Sanggau District – Province of West Kalimantan, oleh Asep Yunan Firdaus 2012

⁹ Untuk mengeksplor data, lihat:

<http://forestsandfinance.org/?explore=AC0.YYYYYYKB.KB.KKKKB.kkk1ke.E.KF.F.G#sthash.2QAjLEYI> and <http://forestsandfinance.org/?explore=ac1.YYYYYYYYYYKK1.KB.KKKKB.kkk1ke.E.KF.F.G>

ⁱ Untuk informasi lebih lanjut mengenai artikel ini, hubungi Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK Indonesia, wiwin@tuk.or.id, tel: + 62 21 835